



Makna Kebebasan dalam Filsafat Klasik dan Relevansinya bagi Kebebasan Manusia Modern

Victor Deak¹, Markus Suwandi², Solihin Bin Nidin³

Pendidikan Agama Kristen, STT Kharisma-Bandung, Indonesia¹

Theolog, STAI Anugrah Indonesia-Surabaya, Indonesia^{2,3}

*Email:

venskavictor@gmail.com, msuwandi73@gmail.com, solihinnidin2@gmail.com

Diterima: 06-01-2026 | Disetujui: 16-01-2026 | Diterbitkan: 18-01-2026

ABSTRACT

This study explores the concept of freedom in classical philosophy by examining its relevance for constructing individual freedom in the modern context. Within contemporary culture where freedom is often reduced to absolute autonomy devoid of ethical grounding there emerges a crisis of meaning expressed through nihilism, hedonism, and radical individualism. Through a hermeneutical-philosophical approach, this study reinterprets the views of classical philosophers such as Socrates, Plato, Aristotle, and the Stoics, who understand freedom not as the absence of limits but as a moral and rational disposition that directs human beings toward self-mastery (enkratēia), practical wisdom (phronēsis), and a life in harmony with the cosmic moral order. The analysis shows that the classical philosophical tradition conceives freedom as a dual existential structure: external freedom, which demands liberation from external domination, and internal freedom, which is realized through moral discipline, the ordering of the soul, and the alignment of the will with logos. This perspective offers a corrective framework to modern conceptions of freedom that tend to be fragmented between the assertion of individual rights and a crisis of moral orientation. The theoretical gap addressed in this research lies in the absence of a comprehensive integration between classical virtue ethics and modern theories of freedom centered on subjective autonomy. The novelty of this study is its presentation of a conceptual synthesis that situates freedom as a dynamic relationship between rights, rationality, and moral responsibility. Thus, the study underscores the urgency of restoring a paradigm of freedom grounded in moral excellence not merely as a theoretical discourse but as a foundation for cultivating mature and responsible individual freedom.

Keywords: Freedom 1; Classical Philosophy 2; Ethic 3; Moral Responsibility 4 ; Stoicism Modern Humanity;5

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi konsep kebebasan dalam filsafat klasik dengan menelaah relevansinya bagi konstruksi kebebasan individu dalam konteks modern. Di tengah budaya kontemporer yang kerap mereduksi kebebasan menjadi otonomi absolut tanpa landasan etis, muncul krisis makna yang diekspresikan melalui nihilisme, hedonisme, dan individualisme radikal. Melalui pendekatan hermeneutik-filosofis, studi ini menginterpretasikan kembali pandangan para filsuf klasik Socrates, Plato, Aristoteles, dan para Stoia yang memahami kebebasan bukan sebagai ketiadaan batas, melainkan sebagai disposisi moral dan rasional yang mengarahkan manusia pada penguasaan diri (*enkratēia*), kebijaksanaan praktis (*phronēsis*), serta hidup selaras dengan tatanan moral kosmis. Analisis menunjukkan bahwa tradisi filsafat klasik memandang kebebasan sebagai struktur eksistensial yang bersifat dual: kebebasan eksternal yang menuntut pembebasan dari dominasi eksternal, dan kebebasan internal yang terwujud melalui disiplin moral, keteraturan jiwa, dan penyelarasan kehendak dengan logos. Perspektif ini menawarkan kerangka korektif terhadap pemahaman kebebasan modern yang cenderung terfragmentasi antara

tuntutan hak individu dan krisis orientasi moral. Gap teoretis penelitian ini terletak pada belum adanya integrasi komprehensif antara etika kebijakan klasik dan teori kebebasan modern yang berfokus pada otonomi subjektif. Kebaruan penelitian ini adalah penyajian sintesis konseptual yang menempatkan kebebasan sebagai relasi dinamis antara hak, rasionalitas, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, studi ini menegaskan urgensi pemulihian paradigma kebebasan yang berakar pada keutamaan moral, tidak hanya sebagai wacana teoretis, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembentukan kebebasan individu yang matang dan bertanggung jawab.

Katakunci: Kebebasan 1; Filsafat Klasik 2; Etika 3; Manusia 4; Stoikisme Moralitas modern 5.

Deak, V., Suwandi, M., & Bin Nidin, S. (2026). Makna Kebebasan Dalam Filsafat Klasik Dan Relevansinya Bagi Kebebasan Manusia Modern. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 379-392.
<https://doi.org/10.63822/1twvz394>

PENDAHULUAN

Berbicara tentang kebebasan berarti kita sedang membicarakan tentang hal yang paling substansial dalam pribadi manusia. Manusia, dengan segala keunikan dan kompleksitasnya, merupakan subjek yang mendalam dan tak terbatas untuk dijelajahi dalam ranah ilmu pengetahuan, filsafat, dan spiritualitas (Siswadi, n.d.) dan juga ranah sosial(Prahastiwi et al., n.d.). Dalam perspektif teologi Kristen, Allah menciptakan manusia dengan kebebasan. Dari realitas ini dapat diambil sebuah aksioma dasar bahwa kebebasan manusia tidak boleh dikurangi dalam bentuk apa pun oleh siapa pun karena kebebasan melekat sebagai hak prerogatif dalam dirinya sebagai seorang manusia. Johann Gottlieb Fichte mengatakan bahwa kebebasan berfokus pada manusia sebagai makhluk yang otonom karena memiliki kehendak bebas dalam dirinya(Aja et al., 2024). Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran akan adanya suatu tanggungjawab atas setiap perbuatan akan memberikan dampak pada anggota masyarakat harus terus ditanamkan. Kekuatan akan rasa tanggungjawab memberikan implikasi atas kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan(Nasution, 2020). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Sejak seseorang dilahirkan, ia telah membawa hak-hak dasar yang tidak boleh dicabut, dikurangi, ataupun dialihkan, apa pun status sosial, keyakinan, ras, atau latar belakangnya. Hak-hak ini meliputi kebutuhan paling mendasar seperti hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, mendapatkan pendidikan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Pada intinya, HAM berpijakan pada prinsip universal bahwa setiap manusia layak untuk dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi(Wahab et al., 2025).

Sejak masa filsafat kuno hingga era modern, manusia selalu berupaya memahami hakikat kebebasan, apa maknanya, bagaimana batas-batasnya, serta bagaimana kebebasan itu dapat diwujudkan secara autentik dalam kehidupan. Dalam tradisi filsafat kuno, kebebasan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan untuk bertindak tanpa paksaan, tetapi lebih dalam lagi sebagai penguasaan diri, kemampuan berpikir rasional, dan hidup selaras dengan kebaikan. Pandangan ini menjadikan kebebasan bukan sekadar hak, melainkan suatu tanggung jawab moral yang melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk berakal budi. Namun, dalam konteks kehidupan modern, makna kebebasan sering kali mengalami pergeseran. Manusia modern cenderung memahami kebebasan secara individualistik dan pragmatis, seolah-olah kebebasan berarti bebas melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan nilai etika serta tanggung jawab moral dan sosial. Fenomena ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan: dari budaya konsumtif, ekspresi diri yang berlebihan di media sosial, hingga sikap relativistik terhadap kebenaran moral. Akibatnya, kebebasan yang semula dimaksudkan untuk memerdekaan manusia justru kerap menjerumuskannya dalam bentuk perbudakan baru perbudakan terhadap hawa nafsu, ego, dan tekanan sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: *apakah manusia modern benar-benar bebas?* Ataukah kebebasan justru telah kehilangan arah moralnya di tengah kompleksitas kehidupan sosial?

John mengatakan bahwa seseorang memiliki dua bentuk kebebasan, yaitu kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif adalah kebebasan yang dimiliki seseorang tanpa campur tangan orang lain, sedangkan kebebasan positif adalah kebebasan yang terikat oleh hak orang lain dan norma yang berlaku (John et al., 2023). Namun, pemahaman ini belum sepenuhnya menjawab dimensi moral dan

spiritual dari kebebasan sebagaimana dibahas dalam filsafat klasik. Di sinilah letak celah teoretis (*theoretical gap*) penelitian ini: sebagian besar kajian modern tentang kebebasan masih menitikberatkan pada aspek sosial-politik dan hak individu, sementara dimensi etis dan batiniah dari kebebasan yang justru menjadi fondasi pemikiran para filsuf klasik seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan kaum Stoa sering terabaikan. Dengan kata lain, terdapat kekosongan konseptual antara pemahaman kebebasan dalam filsafat kuno yang bersifat moral-spiritual dan pendekatan modern yang bersifat liberalis-instrumental.

Berangkat dari gap tersebut, penelitian ini menghadirkan kebaruan (novelty) berupa upaya sintesis konseptual antara pemikiran filsafat kuno dan persoalan kebebasan individu modern. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pandangan klasik secara historis, tetapi juga menafsirkan kembali nilai-nilai kebebasan kuno sebagai model etika normatif dan spiritualitas rasional yang relevan bagi kehidupan masa kini. Dengan demikian, kajian ini menawarkan pendekatan hermeneutik-filosofis baru yang menghubungkan pemikiran klasik dengan realitas modern yakni memaknai kebebasan sebagai keseimbangan antara dimensi eksternal (hak dan kebebasan sosial) dan dimensi internal (penguasaan diri, kebijakan, dan kesadaran moral). Berangkat dari permasalahan tersebut, penting untuk meninjau kembali akar konseptual kebebasan sebagaimana dipahami dalam filsafat kuno. Para filsuf seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan kaum Stoa telah menawarkan pandangan yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan kebebasan. Mereka melihat kebebasan bukan sebagai ketidaaan aturan, melainkan sebagai kemampuan moral dan rasional untuk mengarahkan diri menuju kebaikan. Dengan menelusuri pemikiran para filsuf, kita menemukan dasar filosofis yang kokoh untuk memahami kembali makna kebebasan manusia secara utuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep manusia menurut pemikiran filsafat kuno, menjelaskan bagaimana kebebasan dipahami dalam konteks tersebut, serta menganalisis hubungan antara manusia dan kebebasan dalam pandangan para filsuf kuno. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud menggali nilai-nilai filosofis yang dapat memberikan pencerahan bagi pemahaman manusia modern tentang kebebasan. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir suatu refleksi kritis yang mampu menuntun manusia masa kini untuk tidak terjebak pada kebebasan semu, melainkan menemukan kebebasan sejati yang berakar pada rasionalitas, kebijakan, dan tanggung jawab moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat konseptual-filosofis, yang bertujuan memahami makna kebebasan dalam filsafat klasik serta relevansinya bagi kebebasan individu modern. Melalui kajian pustaka, peneliti menelaah, menafsirkan, dan mensintesiskan gagasan-gagasan filosofis dari berbagai sumber yang relevan. Sumber data utama meliputi karya-karya filsuf klasik seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan kaum Stoa (Zeno, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius). Sumber sekunder mencakup literatur filsafat, etika, dan teori kebebasan dari buku, artikel ilmiah, serta jurnal yang membahas dimensi moral, sosial, dan spiritual kebebasan manusia. Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap: (1) pengumpulan data pustaka dari teks klasik dan literatur akademik; (2) analisis deskriptif-filosofis untuk memaparkan konsep kebebasan kuno dari aspek ontologis, etis, dan rasional; (3) analisis hermeneutik guna menafsirkan makna kebebasan dalam konteks historis dan menemukan nilai-nilainya bagi masa kini; serta (4) sintesis konseptual untuk mengintegrasikan pandangan klasik dengan problematika kebebasan modern. Seluruh

data dianalisis secara kritis, reflektif, dan sistematis dengan menjaga koherensi logis dan kesesuaian makna historis. Melalui metode ini, penelitian berupaya merekonstruksi konsep kebebasan klasik dan menawarkan kontribusi konseptual baru bagi pengembangan wacana kebebasan individu yang berlandaskan rasionalitas, kebijakan, dan tanggung jawab moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan” (*eleutheria*). Istilah *kebebasan* dalam konteks filsafat dan budaya Barat berakar dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata ἐλευθερία (*eleutheria*), yang secara harfiah berarti “keadaan bebas” atau “tidak berada di bawah kekuasaan orang lain.” Dalam masyarakat Yunani klasik, istilah ini mula-mula digunakan dalam konteks politik dan sosial, yakni untuk membedakan antara warga bebas (*eleutheros*) dan budak (*doulos*). Seorang warga polis (negara-kota) disebut bebas karena ia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, menyuarakan pendapat, dan menentukan nasibnya sendiri tanpa paksaan dari pihak luar. Dengan demikian, *eleutheria* mula-mula mencerminkan kemerdekaan lahiriah, yakni kebebasan dari dominasi atau perbudakan. Namun, seiring berkembangnya pemikiran filsafat, makna *eleutheria* mengalami pendalaman. Para filsuf Yunani, terutama Socrates, Plato, dan Aristoteles, memperluas arti kebebasan dari dimensi eksternal menjadi dimensi internal. Kebebasan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kondisi sosial atau politik, tetapi sebagai keadaan jiwa yang mampu menguasai diri dan bertindak sesuai dengan akal budi. Dalam pandangan ini, seseorang baru benar-benar bebas ketika ia tidak diperbudak oleh nafsu, ketidaktahuan, atau dorongan irasional. Maka, *eleutheria* dalam filsafat Yunani tidak hanya berarti “bebas dari sesuatu,” melainkan juga “bebas untuk” bebas untuk melakukan yang baik dan benar berdasarkan pengetahuan yang sejati.

Kebebasan sering kali dipandang sebagai hak kodrat manusia, karena melalui kebebasanlah manusia dapat mengekspresikan kehendaknya, mengembangkan potensi dirinya, serta membangun tanggung jawab moral terhadap tindakannya. Dengan demikian, kebebasan tidak hanya berkaitan dengan aspek eksternal seperti kebebasan politik atau sosial tetapi juga mencakup dimensi internal, yakni kebebasan batin yang bersumber dari kesadaran, rasionalitas, dan pengendalian diri. Namun, dalam konteks filsafat, kebebasan tidak pernah dipahami secara mutlak. Para pemikir menekankan bahwa kebebasan sejati selalu berhubungan dengan kebenaran dan kebaikan. Kebebasan tanpa arah moral hanya akan melahirkan kekacauan dan kehilangan makna. Karena itu dalam tradisi filsafat baik kuno maupun modern, memandang kebebasan sebagai kemampuan untuk memilih yang baik berdasarkan pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, seseorang benar-benar bebas ketika ia dapat melakukan apa saja, melainkan ketika ia mampu menguasai dirinya dan bertindak selaras dengan akal budi serta nilai-nilai etis yang menuntun pada kebijakan.

Kebebasan dapat dipahami sebagai kemampuan manusia untuk bertindak, berpikir, dan menentukan pilihan tanpa adanya paksaan dari luar dirinya. Istilah kebebasan merujuk pada istilah bahasa Inggris liberty dan freedom. Menurut Herry Priyono, meskipun berasal dari akar linguistik berbeda, keduanya menunjukkan hal yang sama. Kata liberty berakar dari kata libertas (Latin), dengan turunan istilah yang mirip dalam kata liberté (Prancis), libertad (Spanyol), libertà (Italia). Sedangkan kata freedom berakar dari rumpun bahasa Eropa Utara, seperti kata Freiheit (Jerman), vrijheid (Belanda), frihet (Swedia), frihed (Denmark). Menurut Joel Feinberg, kedua istilah ini memiliki perbedaan meskipun sering digunakan secara bergantian. Istilah freedom ketika diterapkan pada orang dan tindakannya, merujuk

pada kemampuan seseorang dalam serangkaian keadaan tertentu untuk bertindak dengan cara tertentu. Sedangkan istilah liberty merujuk pada izin otoritatif untuk bertindak dalam beberapa cara tertentu (John et al., 2023).

Manusia dalam filsafat kuno.

Pembahasan tentang manusia menempati posisi sentral dalam filsafat kuno, karena melalui pemahaman tentang dirinya, manusia dapat mengenal hakikat kehidupan dan tujuan keberadaannya. Bagi para filsuf kuno, manusia bukan sekadar makhluk biologis yang hidup di dunia, melainkan makhluk rasional (*Homo est animal rationale*) yang memiliki kesadaran, akal budi, dan tujuan moral. Melalui kemampuan berpikir dan berefleksi, manusia berbeda dari makhluk lainnya, sebab ia dapat menilai tindakannya sendiri dan menentukan arah hidupnya. Dengan demikian, filsafat kuno memandang manusia sebagai makhluk yang mengandung dimensi ganda: jasmani dan rohani, duniawi dan ilahi, terbatas namun juga memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan. Dalam pandangan Socrates, Plato, dan Aristoteles, memahami manusia berarti memahami relasinya dengan kebenaran dan kebajikan. Socrates menegaskan bahwa inti kemanusiaan terletak pada pengetahuan diri “kenalilah dirimu sendiri” yang menjadi dasar bagi tindakan moral yang benar. Sementara itu, Plato memandang manusia sebagai jiwa yang terikat dalam tubuh, yang harus diarahkan menuju dunia ide yang sempurna melalui akal budi. Aristoteles menambahkan bahwa manusia adalah *zoon politikon*, makhluk sosial yang hanya dapat mencapai kebahagiaan sejati melalui kehidupan bermoral dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam filsafat kuno, manusia dipahami sebagai makhluk rasional dan etis yang kebebasannya tidak terlepas dari tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kebaikan dan kebenaran.

Dimensi kebebasan: kebebasan eksternal (politik, sosial) dan internal (moral, spiritual).

Kebebasan sebagai konsep filosofis memiliki dua dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu kebebasan eksternal dan kebebasan internal. Kebebasan eksternal berkaitan dengan kondisi lahiriah manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, politik, dan hukum. Dalam dimensi ini, kebebasan dipahami sebagai *kemerdekaan dari paksaan luar* yakni kebebasan seseorang untuk bertindak, berpendapat, atau menentukan nasib tanpa tekanan atau pembatasan yang tidak adil dari pihak lain. Dalam konteks filsafat dan politik Yunani kuno, misalnya, kebebasan eksternal diwujudkan dalam hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, berdebat di *agora*, dan ikut menentukan arah pemerintahan *polis*. Dengan demikian, kebebasan eksternal merupakan ekspresi sosial dari otonomi manusia di ruang publik. Sementara itu, kebebasan internal mengacu pada dimensi batiniah manusia, yang berkaitan dengan kesadaran moral, rasionalitas, dan kemampuan untuk menguasai diri. Kebebasan ini tidak bergantung pada situasi luar, melainkan pada keadaan jiwa yang mampu memilih yang baik dan menolak yang buruk. Para filsuf seperti Socrates dan kaum Stoa menekankan bahwa kebebasan sejati bukanlah bebas dari aturan, melainkan bebas dari perbudakan batin yakni dari hawa nafsu, ketidaktahuan, dan dorongan yang menyesatkan. Dalam arti ini, kebebasan internal bersifat moral dan spiritual, karena melibatkan proses pembentukan karakter, disiplin diri, serta keselarasan antara pikiran, kehendak, dan tindakan. Dengan demikian, seseorang dapat kehilangan kebebasan eksternal karena kekuasaan atau situasi, tetapi tetap mempertahankan kebebasan internal sejauh ia mampu menguasai dirinya sendiri.

Dalam diskursus filsafat, kebebasan (*freedom, liberty*) merupakan salah satu konsep fundamental yang senantiasa menjadi pusat perdebatan. Sejak zaman Yunani Kuno hingga era modern kebebasan terus

menjadi isu yang tidak pernah habis untuk diperdebatkan. Secara umum, kebebasan dapat dipahami sebagai kemampuan manusia untuk bertindak menurut kehendaknya sendiri. Namun demikian, para filsuf klasik telah menunjukkan bahwa kebebasan bukanlah konsep tunggal, melainkan memiliki dimensi yang berlapis dan saling berkaitan yaitu **kebebasan eksternal** dan **kebebasan internal**, yang secara bersama-sama membentuk dasar pemahaman utuh tentang eksistensi manusia sebagai makhluk rasional dan bermoral.

Kebebasan eksternal merujuk pada kemampuan individu untuk bertindak tanpa adanya paksaan, tekanan, atau intervensi dari pihak luar. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Nietzsche dan Hayek, yang menganggap kebebasan sebagai faktor fundamental dalam perkembangan peradaban manusia dan memperkarsai pada bagaimana individu menjalani ke- hidupannya tanpa *koersi*. Meskipun Nietzsche tidak sama seperti Hayek dalam menentukan tipikal *kehendak* sebagai *lokus* dari kebebasan. Nietzsche mengutarakan bahwa setiap individu mempunyai kehendak kuasa untuk menindak serta menentukan keberadaannya. Sedangkan Hayek menekankan kebebasan individu pada kehendak bertahan, hingga berfokus pada penanganan atas koersi yang selama ini menjadi ancaman bagi kebebasan (HAYEK & HAFIDZ, n.d.). Dalam pengertian ini, kebebasan eksternal mencakup aspek-aspek sosial, politik, dan hukum yang mengatur hubungan individu dengan lingkungannya. Dalam pandangan John Locke, misalnya, dalam *Second Treatise of Government*, menegaskan bahwa kebebasan adalah hak kodrat manusia yang melekat sejak lahir, yang memungkinkan setiap individu untuk menentukan tindakannya sepanjang tidak melanggar kebebasan dan hak orang lain. Kebebasan eksternal dengan demikian berkaitan erat dengan struktur sosial dan politik yang adil. Ia menuntut adanya sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu dan mencegah munculnya dominasi atau penindasan. Dalam tradisi pemikiran klasik Romawi, konsep **libertas** dipahami sebagai kebebasan dari dominasi (*freedom from domination*), yakni suatu kondisi di mana individu tidak berada di bawah kekuasaan sewenang-wenang pihak lain. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya, salah satunya kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan, yang diatur didalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Hsb, 2021). Kebebasan semacam ini menekankan pentingnya *rule of law* dan keadilan sosial sebagai landasan bagi terciptanya kehidupan yang bebas dan bermartabat. Dengan demikian, kebebasan eksternal bukan hanya sekadar kebebasan untuk bertindak, tetapi juga mencakup perlindungan institusional atas hak-hak tersebut. Dalam konteks ini, kebebasan eksternal memiliki relevansi besar bagi kehidupan bernegara dan masyarakat demokratis modern, di mana penghormatan terhadap kebebasan politik, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat merupakan manifestasi konkret dari prinsip kebebasan eksternal.

Sementara itu, **kebebasan internal** berhubungan dengan dimensi batiniah manusia, yakni kemampuan untuk menguasai diri dan bertindak berdasarkan kesadaran moral. Dalam pandangan para filsuf klasik, terutama dalam tradisi Yunani seperti Plato dan Aristoteles, kebebasan sejati tidak terletak pada kemampuan melakukan apa saja, tetapi pada kemampuan untuk memilih yang baik berdasarkan akal budi. Kebebasan yang demikian menuntut adanya pengendalian diri, refleksi moral, dan kesadaran akan nilai-nilai kebenaran. Dalam filsafat Stoia (Stoisme), kebebasan internal dipahami sebagai kebebasan dari belenggu hawa nafsu dan ketergantungan pada hal-hal eksternal. Bagi para Stoia, seseorang baru dapat disebut benar-benar bebas apabila ia tidak diperbudak oleh dorongan-dorongan yang bersifat material dan emosional. Demikian pula, dalam pemikiran Immanuel Kant, kebebasan internal berkaitan dengan **otonomi moral**, yaitu kemampuan manusia untuk bertindak menurut hukum moral yang ia berikan kepada dirinya

sendiri. Kant menegaskan bahwa kebebasan sejati bukanlah “kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan,” melainkan “kebebasan untuk melakukan apa yang seharusnya.” Dengan demikian, kebebasan internal bersifat reflektif dan etis. Ia menuntut integritas batin dan kemampuan rasional untuk menilai baik dan buruk secara mandiri. Dalam konteks spiritualitas, kebebasan internal juga berarti pembebasan dari keterikatan duniawi menuju kesadaran yang lebih tinggi akan hakikat diri dan tujuan hidup manusia. Kebebasan jenis ini menjadi landasan bagi pembangunan karakter dan kematangan moral individu.

Meskipun berbeda dalam ruang lingkupnya, kebebasan eksternal dan kebebasan internal saling melengkapi. Kebebasan eksternal menyediakan kondisi sosial-politik yang memungkinkan individu mengaktualisasikan dirinya tanpa tekanan, sementara kebebasan internal memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan bermoral. Tanpa kebebasan eksternal, manusia kehilangan otonomi sosialnya; namun tanpa kebebasan internal, kebebasan eksternal berpotensi berubah menjadi anarki moral atau hedonisme yang destruktif. Dalam perspektif filsafat klasik, kebebasan sejati hanya dapat tercapai apabila kedua dimensi ini berada dalam keseimbangan. Kebebasan eksternal menuntut tatanan politik yang adil, sedangkan kebebasan internal menuntut tatanan moral yang berakar pada kesadaran dan kebaikan. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh tentang kebebasan harus mencakup kedua aspek tersebut sebagai fondasi bagi pembentukan individu yang bebas, rasional, dan bertanggung jawab.

Kebebasan dalam Tradisi Filsafat Kuno

Dalam tradisi filsafat kuno, kebebasan bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan selalu dikaitkan dengan hakikat manusia dan tujuannya dalam hidup. Para filsuf Yunani melihat bahwa manusia berbeda dari makhluk lain karena memiliki logos, yaitu kemampuan berpikir rasional yang memungkinkan ia mengenal kebenaran dan bertindak sesuai kebaikan. Oleh karena itu, kebebasan sejati bagi manusia tidak terletak pada kebebasan untuk melakukan segala hal yang diinginkan, melainkan pada kemampuan untuk menguasai diri dan hidup selaras dengan akal budi. Dalam kerangka ini, kebebasan menjadi jalan menuju kesempurnaan moral, bukan sekadar pelarian dari aturan eksternal. Socrates, misalnya, menegaskan bahwa seseorang baru benar-benar bebas ketika ia mengenal dirinya sendiri dan bertindak berdasarkan pengetahuan tentang kebaikan. Bagi Plato, kebebasan adalah keteraturan jiwa, di mana bagian rasional mengendalikan nafsu dan keinginan yang tidak teratur. Aristoteles kemudian menekankan bahwa kebebasan sejati hanya mungkin ada dalam konteks etika, ketika manusia menggunakan akalnya untuk memilih yang baik dan mencapai *eudaimonia* kebahagiaan sejati. Adapun kaum Stoa seperti Epictetus dan Marcus Aurelius melihat kebebasan sebagai keadaan batin yang tidak tergantung pada dunia luar; bahkan seorang budak pun bisa bebas jika ia mampu menguasai dirinya dan hidup sesuai dengan alam (*logos*). Dengan demikian, dalam filsafat kuno, kebebasan selalu memiliki dimensi moral dan spiritual. Kebebasan tidak berarti tanpa batas atau tanpa arah, tetapi justru menuntut tanggung jawab dan pengendalian diri. Pemikiran ini memberikan dasar konseptual yang kuat bagi pemahaman kebebasan sebagai sesuatu yang berakar dalam kodrat manusia yang rasional dan etis, sebuah pandangan yang tetap relevan bagi manusia modern yang sering terjebak dalam pemahaman kebebasan yang dangkal dan individualistik.

Gambaran umum pemikiran filsafat Yunani dan Romawi.

Filsafat Yunani dan Romawi lahir dalam konteks peradaban yang menempatkan manusia sebagai pusat refleksi rasional tentang alam semesta dan kehidupan. Bagi para filsuf Yunani, filsafat bukan hanya pencarian pengetahuan teoretis, tetapi juga upaya menemukan cara hidup yang baik (*the good life*). Mereka

meyakini bahwa manusia adalah makhluk rasional (*animal rationale*) yang memiliki potensi untuk mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati melalui penguasaan diri serta penggunaan akal budi. Pemikiran ini kemudian berkembang dari masa pra-Sokrates yang berfokus pada kosmos dan asal-usul alam, menuju filsafat etika dan antropologis pada masa Socrates, Plato, dan Aristoteles. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para pemikir Romawi, terutama dari mazhab Stoa, yang menekankan pentingnya hidup sesuai dengan hukum alam (*logos*) dan mengajarkan bahwa kebebasan sejati bersumber dari ketenangan batin serta kemandirian moral.

Konteks historis dan sosial pada masa itu sangat memengaruhi cara pandang terhadap kebebasan. Dalam masyarakat Yunani klasik, terutama di polis seperti Athena, kebebasan identik dengan status warga negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan publik. Kebebasan pada masa itu bukan hanya persoalan pribadi, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan politik warga negara terhadap komunitasnya. Sementara itu, pada masa Romawi, terutama di era kekaisaran, kebebasan memperoleh makna yang lebih mendalam secara spiritual dan moral. Para filsuf Stoa seperti Seneca dan Epictetus menekankan bahwa meskipun seseorang dapat kehilangan kebebasan secara lahiriah karena perbudakan atau kekuasaan politik, ia tetap dapat memiliki kebebasan batin jika mampu menguasai dirinya dan hidup sesuai dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, baik dalam tradisi Yunani maupun Romawi, kebebasan dipahami bukan semata sebagai kondisi politik, melainkan sebagai keadaan moral dan spiritual yang mencerminkan kematangan manusia sebagai makhluk rasional.

Socrates (470–399 SM): Kebebasan sebagai Hasil Pengetahuan Diri (*Know Thyself*). Socrates merupakan filsuf pertama yang menempatkan kebebasan dalam konteks **moral dan kesadaran diri**. Bagi Socrates, kebebasan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk melakukan apa saja, melainkan pada **kemampuan manusia untuk mengenal dan menguasai dirinya sendiri** (*gnothi seauton* “kenalilah dirimu sendiri”). Melalui pengetahuan diri, seseorang memahami hakikat kebaikan dan keburukan, sehingga mampu mengarahkan tindakannya berdasarkan kebijaksanaan moral. Menurut Socrates, “orang bebas” adalah mereka yang **tidak diperbudak oleh nafsu dan kebodohan moral**. Sebaliknya, orang yang mengikuti dorongan tanpa pengetahuan yang benar adalah “budak” dari dirinya sendiri. Dengan demikian, kebebasan dalam pandangan Socrates merupakan hasil dari **refleksi rasional dan pembinaan etis**, bukan kebebasan tanpa arah. “Tiada kebijakan tanpa pengetahuan, dan tiada kebebasan tanpa kebijakan.” *Socrates* (dalam Xenophon, *Memorabilia*)

Plato (427–347 SM): Kebebasan dan Keteraturan Jiwa. Bagi Plato, murid Socrates, kebebasan sejati berkaitan erat dengan keteraturan dan keharmonisan jiwa. Dalam karyanya *Republic* dan *Phaedrus*, Plato membagi jiwa manusia menjadi tiga unsur: rasio (logistik), semangat (thymoeides), dan nafsu (epithymetik). Jiwa yang teratur adalah ketika rasio menguasai dua unsur lainnya dan mengarahkannya pada kebaikan tertinggi (*the Good*). Kebebasan, dalam kerangka ini, bukanlah ketiadaan batas, melainkan kemampuan rasio untuk menuntun kehendak dan nafsu sesuai dengan tatanan moral dan kosmis. Orang yang rasional berarti orang yang bebas, karena ia hidup selaras dengan prinsip kebenaran. Sebaliknya, mereka yang diperbudak oleh hasrat atau kesenangan dunia kehilangan kebebasan sejatinya. Dengan demikian, bagi Plato, kebebasan identik dengan ketertiban moral dan spiritual, bukan dengan tindakan sewenang-wenang. Jiwa yang bebas adalah jiwa yang tertata dan terarah menuju kebijaksanaan. Immanuel Kant juga mengatakan hal yang serupa. Menurut Kant, kebebasan tidak sekadar berarti kemampuan bertindak sesuka hati, melainkan kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum moral yang ditentukan oleh rasionalitas (Jilan et al., 2025). Dengan kata lain kebebasan adalah sebuah tindakan

yang diarahkan oleh akal budi menuju kepada kebaikan tanpa mengurangi hak orang lain. Jadi tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas karena semuanya terikat pada hal orang lain.

Aristoteles (384–322 SM): Kebebasan dan Tanggung Jawab Moral. Aristoteles mengembangkan gagasan kebebasan dengan menekankan aspek tanggung jawab moral dan rasionalitas manusia. Dalam *Ethica Nicomachea*, ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional (*zoon logon echon*) yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakannya secara sadar (*prohairesis*). Menurut Aristoteles, seseorang dapat disebut bebas apabila ia bertindak berdasarkan akal budi dan kebajikan (virtue), bukan karena paksaan eksternal atau dorongan irasional. Kebebasan sejati tercermin dalam kemampuan untuk memilih jalan tengah (*mesotes*), yaitu bertindak secara moderat dan bijak di antara dua ekstrem (misalnya, keberanian di antara pengecut dan nekat). Bagi Aristoteles, kebebasan mengandung tanggung jawab moral: manusia bebas karena ia mampu memilih dan mempertanggungjawabkan pilihannya. Oleh karena itu, kebebasan tidak dapat dipisahkan dari etika dan pendidikan moral, karena hanya melalui kebajikan manusia dapat menggunakan kebebasannya secara benar.

Kaum Stoa (Zeno, Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius): Kebebasan Batin di Tengah Keterikatan Luar. Dalam filsafat Stoa (Stoisme), kebebasan tidak ditentukan oleh keadaan eksternal, melainkan oleh **sikap batin terhadap keadaan tersebut**. Para filsuf Stoa berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kendali atas segala peristiwa di luar dirinya seperti nasib, kekuasaan, atau penderitaan namun memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan **bagaimana ia merespons** hal-hal tersebut. Epictetus menegaskan, “*Kita tidak bebas mengendalikan keadaan, tetapi kita bebas menentukan sikap terhadapnya.*” Oleh karena itu, kebebasan sejati bersumber dari **penguasaan diri dan ketenangan batin**, bukan dari kekuasaan atau kenikmatan eksternal. Kaum Stoa memahami kebebasan sebagai **keselarasan dengan alam semesta (logos)** yakni hidup sesuai dengan rasio kosmis dan hukum alam yang rasional. Seseorang menjadi bebas apabila ia menerima takdirnya dengan bijaksana (*amor fati*) dan menjaga keseimbangan batinnya di tengah perubahan dunia luar. Dalam hal ini, kebebasan Stoa bersifat spiritual dan universal: semua manusia dapat mencapainya tanpa bergantung pada kondisi sosial atau politik. Sedangkan dalam pandangan filsafat abad pertengahan kebebasan manusia sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dogmatis selalu mengarah pada konsep kebebasan manusia sebagai kebebasan yang semu dan bukan kebebasan yang absolut sehingga hidup sesuai dengan determinasi adalah hidup yang baik sedangkan hidup yang sebaliknya adalah keburukan. Konsekuensi dari pemikiran tersebut adalah disinyalir adalah penghilangan martabat manusia sebagai makhluk yang otonom dan berakal budi(Aja et al., 2024).

Dalam pandangan filsuf kuno, dapat disimpulkan bahwa **hakikat kebebasan dalam filsafat klasik** tidak identik dengan kebebasan tanpa batas atau kebebasan untuk bertindak sekehendak hati. Sebaliknya, kebebasan dipahami secara **etis, rasional, dan teleologis** yakni selalu mengarah pada tujuan moral dan kebaikan tertinggi. Kebebasan sebagai Penguasaan Diri, Bukan Kebebasan Tanpa Batas. Para filsuf klasik menolak pandangan bahwa kebebasan berarti ketiadaan batas. Bagi mereka, kebebasan sejati adalah **kemampuan untuk menguasai diri sendiri**, baik dari dorongan nafsu maupun tekanan eksternal. Socrates, Plato, dan para Stoa sama-sama menekankan bahwa seseorang hanya benar-benar bebas ketika ia mampu mengatur keinginannya sesuai dengan akal dan moralitas. Thomas Aquinas memahami moralitas sebagai ketaatan terhadap hukum kodrat, hukum kodrat yang di maksudkan sebagai keterarahan kodrat manusia, bersama dengan kodrat alam semesta pada perwujudan hakekatnya, hidup menurut kodrat berarti hidup sedemikian rupa hingga kita mencapai tujuan kita dan menjadi bahagia(JEPI, 2022). Sedangkan dalam pandangan Kant, otonomi moral menjadi prinsip dasar yang menempatkan individu sebagai subjek

rasional yang mampu menetapkan hukum moral secara mandiri melalui akal budi. Otonomi ini tidak hanya membebaskan manusia dari pengaruh eksternal, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan prinsip universal(Jilan et al., 2025). Immanuel Kant merupakan salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah filsafat Barat. Kant memandang kebebasan sebagai kondisi dasar bagi moralitas. Kebebasan memungkinkan individu untuk bertindak berdasarkan hukum moral yang ditentukan sendiri(Kamaruddin & Adam, 2025).

Hubungan antara Kebebasan, Akal Budi, dan Kebajikan. Kebebasan dalam filsafat klasik selalu terkait erat dengan **akal budi (logos)** sebagai landasan tindakan moral. Tanpa akal, kebebasan kehilangan arah dan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Aristoteles bahkan menegaskan bahwa kebebasan tanpa kebijikan akan menghancurkan tatanan moral masyarakat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah hak absolut, melainkan **tanggung jawab rasional** yang menuntut kebijaksanaan dalam penggunaannya. Dalam Pandangan Fichte, ia menegaskan bahwa semua manusia adalah makhluk yang bebas dan otonom karena memiliki kesadaran dan akal budi dalam dirinya sendiri. Sebagai makhluk yang otonom dan berakal budi, setiap manusia dapat menentukan hidupnya dengan bebas tanpa ada paksaan dari luar dirinya(Aja et al., 2024).

Kebebasan sebagai Jalan Menuju Kebaikan dan Kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua tradisi filsafat klasik sepakat bahwa tujuan kebebasan adalah **kebaikan (agathon)** dan **kebijaksanaan (sophia)**. Kebebasan bukan sekadar hak untuk memilih, melainkan sarana bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang baik (*eudaimonia*) (Siswadi, n.d.). Dalam konteks ini, kebebasan bersifat teleologis: ia memiliki arah moral yang mengantar manusia menuju kesempurnaan akal dan jiwa. Dalam kehidupan modern, konsep kebebasan sering kali mengalami **distori makna**. Kebebasan kerap dipahami secara dangkal sebagai **kebebasan absolut**, yakni kemampuan untuk melakukan apa saja tanpa batas dan tanpa tanggung jawab moral. Paradigma ini tumbuh seiring berkembangnya individualisme dan relativisme moral dalam masyarakat modern. Kebebasan yang dilepaskan dari landasan etis dan rasionalitas melahirkan krisis nilai yang nyata. Ketika kebebasan dipandang hanya sebagai hak tanpa kewajiban, manusia kehilangan arah moral dan eksistensialnya. Kondisi ini memunculkan berbagai gejala sosial seperti **nihilisme**, yaitu pandangan bahwa hidup tidak memiliki makna atau nilai objektif; **individualisme ekstrem**, di mana manusia hanya berpusat pada kepentingan diri sendiri; serta **disorientasi moral**, di mana batas antara benar dan salah menjadi kabur. Dengan demikian, krisis makna kebebasan modern terletak pada terputusnya hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Manusia modern memiliki kebebasan dalam arti eksternal hak, akses, dan pilihan namun sering kehilangan kebebasan dalam arti internal, yaitu kemampuan menguasai diri dan mengarahkan kebebasan itu untuk kebaikan.

Filsafat klasik menawarkan refleksi mendalam tentang hakikat kebebasan sejati **yang** sangat relevan untuk mengatasi krisis makna tersebut. Para filsuf kuno menekankan bahwa kebebasan tidak dapat dilepaskan dari disiplin moral, kesadaran diri, dan rasionalitas. Socrates mengajarkan bahwa kebebasan hanya dimiliki oleh mereka yang mengetahui diri sendiri dan mampu bertindak berdasarkan pengetahuan yang benar. Plato menegaskan bahwa kebebasan adalah keteraturan jiwa, di mana rasio mengendalikan nafsu dan kehendak. Aristoteles menambahkan bahwa kebebasan sejati hanya mungkin jika tindakan manusia diarahkan oleh kebijikan (*virtue*), bukan oleh keinginan instingtif. Kaum Stoa melengkapi pandangan ini dengan dimensi spiritual: manusia tidak dapat mengendalikan keadaan eksternal, tetapi dapat mengendalikan sikap batinnya terhadap keadaan tersebut. Kebebasan, bagi mereka, adalah ketenangan batin dan keselarasan dengan rasio alam (*logos*). Dari seluruh ajaran ini, tersirat bahwa kebebasan sejati

menuntut penguasaan diri, rasionalitas, dan kebijakan moral. Kebebasan bukan berarti ketiadaan batas, tetapi kemampuan untuk menata diri dalam batas yang sesuai dengan akal dan kebaikan. Maka, pelajaran utama dari filsafat kuno adalah bahwa kebebasan yang tidak disertai kesadaran moral bukanlah kebebasan, melainkan bentuk lain dari perbudakan terhadap hawa nafsu dan keserakahan.

Konsep kebebasan klasik memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan kontemporer, terutama dalam bidang etika sosial, pendidikan karakter, dan spiritualitas pribadi. Pertama, dalam konteks sosial dan politik, kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Prinsip ini penting agar kebebasan individu tidak merugikan kebebasan orang lain. Pemahaman Aristoteles tentang kebijakan dapat diterapkan dalam pembentukan warga negara yang bukan hanya bebas, tetapi juga bijak dan berintegritas dalam kehidupan publik. Kedua, dalam konteks pendidikan, gagasan filsafat klasik menekankan pentingnya pembentukan karakter. Kebebasan individu tidak akan bermakna tanpa pembinaan rasionalitas, moralitas, dan kesadaran diri. Pendidikan modern dapat mengambil inspirasi dari ideal Socrates dan Plato bahwa pengetahuan sejati harus menuntun pada kebijakan, bukan hanya pada keterampilan praktis. Ketiga, dalam ranah spiritualitas, ajaran kaum Stoa menawarkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan hidup modern: ketenangan batin, penerimaan terhadap realitas, dan kebebasan dari ketergantungan emosional. Nilai-nilai ini sangat penting bagi manusia modern yang sering terjebak dalam kecemasan dan ketidakpastian eksistensial. Dengan demikian, relevansi konsep kebebasan klasik bagi manusia modern terletak pada kemampuannya mengembalikan kebebasan kepada hakikatnya yang sejati: kebebasan yang berakar pada kesadaran, kebijakan, dan tanggung jawab moral.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para filsuf klasik memiliki pandangan yang saling melengkapi mengenai kebebasan: Socrates menekankan dimensi etis dan reflektif: kebebasan adalah hasil pengetahuan diri dan kebijaksanaan moral. **Plato** mengembangkan dimensi psikologis dan metafisik: kebebasan sejati adalah keteraturan jiwa, ketika rasio memerintah nafsu (Effendi, 2017). Manusia memiliki kebebasan untuk bertindak tetapi tindakannya harus tetap terikat kepada etika dan moral dan normatif yang berlaku secara universal(Dewantara & SS, 2017). **Aristoteles** menekankan aspek rasional dan praktis: kebebasan diwujudkan dalam tindakan yang berlandaskan akal budi dan kebijakan. Dalam filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif, dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Sudah menjadi kodrat manusia untuk menjadi makhluk yang memiliki kebebasan, bebas untuk berpikir, berkehendak, dan berbuat(Amar, n.d.). **Kaum Stoa** menambahkan dimensi spiritual dan universal: kebebasan adalah kemandirian batin dan penerimaan terhadap hukum alam. Stoikisme adalah aliran filsafat kuno yang didirikan di Athena oleh pedagang Fenisia sejak 301 SM atau abad ke-3 SM . Pencetusnya, yakni para filsuf Yunani Kuno bernama Zeno. Awalnya disebut Zenonisme tetapi kemudian dikenal sebagai Stoikisme karena Zeno dan para pengikutnya bertemu, berdebat dan berdialog di Stoa Poikilê, atau Painted Porch(Ekowati, 2023).

Dari ketiga pandangan ini, terlihat bahwa filsafat klasik melihat kebebasan bukan sebagai kebebasan negatif (bebas dari), melainkan kebebasan positif (bebas untuk) yakni kebebasan untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan diri. Perbandingan ini menunjukkan kesinambungan ide: kebebasan dalam filsafat klasik tidak pernah dipisahkan dari rasionalitas, etika, dan keseimbangan batin. Ketiga aliran berpandangan bahwa manusia baru benar-benar bebas ketika ia hidup selaras dengan akal dan kebaikan. Dalam konteks kehidupan modern, pemikiran para filsuf klasik menawarkan kerangka filosofis untuk memahami kebebasan secara integral.

Pertama, kebebasan harus mencakup dua dimensi: **eksternal** (kebebasan dari penindasan) dan internal (kebebasan batin dan moral). Kedua, kebebasan tanpa rasionalitas dan tanggung jawab akan melahirkan kekacauan moral; sebaliknya, rasionalitas tanpa kebebasan akan melahirkan penindasan spiritual. Ketiga, kebebasan yang sejati adalah sintesis antara akal, kebijikan, dan ketenangan jiwa sebuah keseimbangan yang mengangkat manusia dari sekadar makhluk biologis menjadi makhluk etis dan spiritual. Dengan demikian, filsafat klasik memberikan arah bagi manusia modern untuk menafsirkan ulang kebebasan, bukan sebagai kebebasan absolut tanpa batas, melainkan sebagai proses pematangan diri menuju kebijaksanaan dan tanggung jawab moral. Hanya dengan cara ini kebebasan individu dapat menjadi dasar bagi kehidupan yang bermakna, adil, dan harmonis.

KESIMPULAN

Filsafat kuno memberikan fondasi yang kokoh bagi pemahaman manusia tentang hakikat kebebasan. Bagi para filsuf klasik, manusia adalah makhluk rasional dan moral yang memiliki potensi untuk mengarahkan kehidupannya menuju kebaikan. Oleh karena itu, kebebasan tidak pernah dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kemampuan untuk menguasai diri, bertindak sesuai dengan rasio, serta menjaga keselarasan antara kehendak pribadi dan tatanan moral universal. Socrates menegaskan bahwa kebebasan sejati bersumber dari pengetahuan diri; seseorang menjadi bebas ketika ia memahami dirinya dan mampu menundukkan dorongan yang tidak rasional. Plato melanjutkan gagasan ini dengan menyatakan bahwa kebebasan muncul dari keteraturan jiwa, yakni ketika rasio memimpin dua bagian jiwa lainnya semangat dan nafsu secara harmonis. Aristoteles menambahkan dimensi etis dengan menekankan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan yang dilandasi tanggung jawab moral dan kebijikan, sebab tindakan bebas selalu harus disertai kesadaran akan akibatnya. Kaum Stoa kemudian menegaskan bahwa kebebasan adalah kebebasan batin, yang memungkinkan manusia tetap tenang dan rasional di tengah kondisi eksternal yang tidak dapat ia kendalikan. Dari keempat pandangan ini, tampak bahwa kebebasan sejati menurut filsafat klasik adalah kebebasan moral dan spiritual, bukan semata-mata kebebasan sosial atau politik. Kebebasan dipahami sebagai kemampuan untuk memilih yang baik dan benar berdasarkan akal budi, bukan sekadar kebebasan untuk melakukan apa saja. Hakikat kebebasan adalah penguasaan diri sebuah kemampuan untuk mengatur keinginan, menahan hawa nafsu, dan menata kehidupan selaras dengan prinsip kebaikan universal. Inilah kebebasan yang membawa manusia pada *eudaimonia*, kehidupan yang bijaksana dan bermakna. Dalam konteks kontemporer, pemikiran klasik ini memiliki relevansi yang besar. Dunia modern sering kali memaknai kebebasan secara sempit, sebagai kebebasan absolut tanpa tanggung jawab moral. Akibatnya muncul berbagai krisis nilai: nihilisme, disorientasi moral, dan alienasi spiritual. Pemikiran para filsuf kuno dapat menjadi rambu normatif bagi masyarakat modern untuk menyeimbangkan antara hak dan tanggung jawab, antara kebebasan eksternal dan kebebasan internal. Nilai-nilai klasik seperti pengetahuan diri (Socrates), keteraturan batin (Plato), kebijikan moral (Aristoteles), dan ketenangan batin (Stoa) dapat menjadi prinsip etis dan spiritual dalam menghadapi tantangan globalisasi, krisis moral, dan kemerosotan karakter manusia modern. Dengan demikian, filsafat kuno memberikan inspirasi untuk menafsirkan ulang kebebasan modern agar tidak terjebak dalam individualisme ekstrem. Kebebasan sejati bukanlah sekadar hak untuk memilih, tetapi tanggung jawab untuk memilih secara rasional dan bermoral. Kebebasan yang demikianlah yang memanusiakan manusia, sebab ia mengintegrasikan dimensi etis, rasional, dan spiritual dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aja, D. M., Se, E. D. S., Righo, I. D., & Naibina, G. A. (2024). *Meneropong Relevansi Konsep Kebebasan Fichte Terhadap Pandangan Kebebasan dalam Etika Kontemporer*. 7(3), 467–475.
- Amar, A. (n.d.). *ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI*.
- Dewantara, A. W., & SS, M. (2017). *Filsafat moral: Pergumulan etis keseharian hidup manusia*. PT Kanisius.
- Effendi, R. (2017). *Filsafat kebahagiaan: Plato, aristoteles, al-ghazali, al-farabi*. Deepublish.
- Ekowati, S. (2023). *Paradigma Psikologi Komunikasi dalam Memandang Permasalahan Melalui Nilai-nilai Stoikisme di Kalangan Remaja*. 2(1), 54–71.
- HAYEK, N. D. A. N., & HAFIDZ, S. G. (n.d.). *KONSEP KEBEBASAN MENURUT*.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- JEPI, W. (2022). *Etika Nikomachea Dalam Perspektif Aristoteles Studi Atas Etika Manusia*. UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.
- Jilan, S., Fauzan, M., Zulfikar, K., Putri, C., & Naika, S. (2025). *Prinsip Otonomi Moral dalam Filsafat Hukum Immanuel Kant: Analisis terhadap Konsep Kebebasan dan Kewajiban*. 1–16. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- John, M., Mill, S., & Pramana, O. M. Y. (2023). *Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan*. 09(04), 33–44.
- Kamaruddin, S. A., & Adam, A. (2025). PEMIKIRAN IMMANUEL KANT TENTANG OTONOMI DAN KEBEBASAN: IMPLIKASI FILOSOFIS DALAM PENDIDIKAN MORAL. *Journal Of Midwifery And Nursing Studies*, 7(1).
- Nasution, L. (2020). *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*. 4, 37–48.
- Prahastiwi, E. D., Efendi, M., & Widodo, J. (n.d.). *HAKIKAT MANUSIA : Perspektif Pakar Klasik dan Modern*.
- Siswadi, G. A. (n.d.). MANUSIA SEBAGAI HOMO COMPLEXUS: SEBUAH PENGANTAR MEMAHAMI MANUSIA DALAM BINGKAI FILSAFAT. *FILSAFAT MANUSIA*, 1.
- Wahab, R. M., Putri, A. R., & Nurramdan, T. (2025). Konsep Hukum Alam Dalam Pemikiran Stoa: Menelusuri Pengaruh Pemikiran Stoa pada Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(01).